

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMA NEGERI I KARANGANYAR DAN SMA NEGERI MOJOGEDANG**

TESIS



Oleh

J U M I R A N
NIM : Q. 100030010

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
KONSENTRASI MANAJEMEN SISTEM PENDIDIKAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2005**

PENGESAHAN

TESIS

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMA NEGERI 1 KARANGANYAR DAN
SMA NEGERI MOJOGEDANG**

OLEH:

J U M I R A N
NIM : Q. 1000 300 10

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan dalam proses ujian

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. YETTY SARJONO, M.Si

Drs. H. HARSONO, SU

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMA NEGERI I KARANGANYAR DAN
SMA NEGERI MOJOGEDANG

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan

Oleh :
J U M I R A N

Nim : Q 1000 300 10
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Sistem Pendidikan

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta 57102 Telp. 717417 Eks. 159/162

P E R S E T U J U A N

Judul Tesis : OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE
SEKOLAH DALAM MENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DI SMA NEGERI I KARANGANYAR
DAN SMA NEGERI MOJOGEDANG
Diajukan oleh : J u m i r a n
NIM : Q. 100030010
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Sistem Pendidikan

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara, dengan ini kami menilai teisis ini kami setuju untuk diteruskan pada ujian tesis.

Surakarta, Oktober 2005

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. YETTY SARJONO, M.Si)

(Drs. H. HARSONO, SU)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Berkat Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tesis ini. Kami menyadari bahwa sulit menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Adapun beberapa pihak yang berjasa dalam penyelesaian tesis ini, sehingga kepada mereka patut disampaikan ucapan terima kasih:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis bisa kuliah di UMS.
2. Dr. Yetty Sarjono, M.Si. selaku pembimbing I, atas saran-saran dan kebijaksanaannya dalam membimbing penulis.
3. Drs. H. Harsono, SU. selaku pembimbing II, atas kesabaran dan keikhlasannya dalam meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang telah rekomendasi untuk dapat mengadakan penelitian di kedua SMA.
5. Drs. Maryanto, MM. Kepala SMA Negeri I Karanganyar dan Drs. Moelyadi, MM. Kepala SMA Negeri Mojogedang, yang keduanya telah memberikan ijin, sehingga penulis bisa melakukan penelitian di SMA masing-masing.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas.

Akhirnya, kami berharap semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi SMA Negeri I Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang, untuk pengembangan pendidikan di wilayah Karanganyar dan bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, Oktober 2005

Jumiran

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMA NEGERI I KARANGANYAR DAN
SMA NEGERI MOJOGEDANG

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan

Oleh :
J U M I R A N

Nim : Q 1000 300 10
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Sistem Pendidikan

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2005

NOTA PEMBIMBING

Dr. Yetty Sarjono, M.Si

Drs. Harsono, SU.

Dosen Magister Manajemen Pendidikan
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Jumiran

Kepada Yth.

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama : Jumiran
NIM : Q 1000 300 10
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan
Judul Tesis : Optimalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Negeri I
Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang.

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 September 2005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yetty Sarjono, M.Si

Drs. Harsono, SU

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **J U M I R A N**

NIM : Q 1000 300 10

Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan

Judul Tesis : OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMA NEGERI I KARANGANYAR DAN SMA NEGERI
MOJOGEDANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta, 20 September 2005

Yang membuat pernyataan

J U M I R A N

ABSTRAK

JUMIRAN, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri I Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang. Dengan penjabaran sebagai berikut; (1) mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang, (2) mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang, (3) mengetahui bentuk kerjasama antara komite sekolah dengan warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, dan staf serta siswa) di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang.

Sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari kepala sekolah dan komite sekolah. Dalam penelitian ini kepala sekolah berfungsi sebagai key informan, sedangkan data penunjang diperoleh dari dokumentasi dan keterangan dari pengurus komite, guru, staf dan siswa serta orang tua siswa. Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen. Peneliti sendiri berfungsi sebagai pewawancara. Data penelitian yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis antar kasus (cross-site analysis) dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu reduksi data, verifikasi atau penarikan kesimpulan

Hasil penelitian dipaparkan berikut ini: perbandingan kepemimpinan SMA Negeri I Karanganyar dengan SMA Negeri Mojogedang disebabkan oleh daya dukungan lingkungan fisik dan sosial yang berbeda. Peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di kedua SMA. Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di kedua SMA. Usaha yang ditempuh dengan pemanfaatan lingkungan fisik dan sosial, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran serta peningkatan kualitas guru. Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan mengadakan pertemuan rutin yang membahas tentang kemajuan sekolah. Mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bentuk kerjasama komite sekolah dengan warga sekolah yang dilakukan yaitu : mengadakan diskusi tentang pengelolaan dana sekolah, insentif guru dan tenaga tidak tetap/ honorer, memberikan arahan kepada siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan semangat kepada guru untuk berkompetisi

Optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah diupayakan secara sungguh-sungguh di kedua SMA tersebut. Masing-masing SMA mempunyai strategi optimalisasi peran komite sekolah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan/ daya dukung lingkungan, fisik, sosial, dan religius

Kata kunci : peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Focus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	13
A. Komite Sekolah.....	13
1. Pengertian	15
2. Kedudukan dan Sifat.....	16
3. Tujuan	17
4. Fungsi dan Peran.....	18
5. Organisasi Komite	20
6. Dasar Pembentukan Komite Sekolah	24
7. Kewenangan Komite Sekolah.....	27
B Karakteristik Sekolah	28
1. Kepemimpinan Sekolah	28
2. Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah	29
3. Peningkatan Mutu Pendidikan.....	36

	4. Tugas dan Fungsi Kepala Sekola	37
	5. Kinerja Kepala Sekolah.....	38
	C. Sejarah Karanganyar dan Filosofi Pendidikan Jawa	49
	D. Penelitian Terdahulu	52
BAB III	METODE PENELITIAN.....	54
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
	C. Kehadiran Peneliti	55
	D. Data dan Sumber Data.....	55
	E. Tahap-Tahap Pengumpulan Data	57
	F. Analisa Data	59
	G. Validitas Data.....	62
BAB IV	PENYAJIAN DATA	59
	A. SMA Negeri I Karanganyar	65
	1. Profil SMA Negeri I Karanganyar	65
	2. Kepemimpinan	69
	3. Pengendalian Mutu.....	82
	4. Peran Komite Sekolah.....	85
	B. SMA Negeri Mojogedang	94
	1. Profil SMA Negeri Mojogedang	94
	2. Kepemimpinan	97
	3. Pengendalian Mutu.....	99
	4. Peran Komite Sekolah.....	104
BAB V	PEMBAHASAN	112
	A. Perbandingan Kepemimpinan SMA Negeri I Karanganyar dengan SMA NegeriMojogedang	112
	1. Kepemimpinan SMA Negeri I Karanganyar.....	112
	2. Kepemimpinan SMA Negeri Mojogedang.....	113

B. Perbandingan Pengendalian Mutu Sekolah.....	114
1. Usaha Pengendali Mutu SMA Negeri I Karanganyar.....	114
2. Usaha Pengendali Mutu di SMA Negeri Mojogedang.....	115
C. Perbandingan Pengendalian Mutu Sekolah.....	115
1. Peran Komite Sekolah di SMA Negeri I Karanganyar	115
2. Peran Komite Sekolah di SMA Negeri Mojogedang	116
3. Perbedaan peran dan fungsi komite sekolah di SMA Negeri I Karanganyar dan Mojogedang.....	118
D. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Teori	119
1. Kepemimpinan.....	119
2. Pengendalian Mutu	120
3. Peran Komite Sekolah.....	122
 BAB VI PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan selama ini mengandung persepsi bahwa partisipasi tersebut terwujud dalam peran serta BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) di sekolah. Persepsi tersebut sudah melekat dalam hati masyarakat yang selama ini menyekolahkan anaknya. Fungsi BP3 hanya sebagai pendamping kepala sekolah dalam menentukan besarnya sumbangan pendidikan di sekolah. Masyarakat melalui BP3 tidak pernah lebih dalam terlibat dalam pengembangan – pengembangan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proses pendidikan di sekolah seperti yang diharapkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas dalam pasal 8 dan 9, berbunyi “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” (UU Sisdiknas; 2003 : 9)

Masyarakat sementara ini masih banyak yang tidak mau tahu apa yang sedang terjadi di sekolah. Masyarakat hanya menanti hasil dari proses pendidikan sekolah tersebut melalui kelulusan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komisi pendidikan nasional :

Hampir di daerah Kabupaten/Kota partisipasi masyarakat masih rendah. Mengingat manfaat partisipasi masyarakat ini sangat besar artinya bagi kemajuan pendidikan, partisipasi masyarakat ini perlu ditingkatkan untuk mengangkat mutu pendidikan yang ditawarkan di daerah. Langkah ini juga mendukung otonomi pengelolaan pendidikan pada tataran sekolah dalam kerangka penerapan model SBM (School Based Management) yang ber CBM (Community Based Management). (Komisi Pendidikan Nasional : 2001 : 34)

Masyarakat menganggap bahwa proses pendidikan di sekolah adalah menjadi tanggungjawab sekolah dan pemerintah. Seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan proses yang berlangsung di sekolah yang menyediakan dan menentukan standarnya adalah pemerintah. Masyarakat tidak berhak untuk ikut terlibat dalam menentukan semua kebutuhan mulai dari sarana, ketenagaan, kurikulum, pengembangan sekolah, hingga manajemen kesiswaan. Hak dan kewajiban orang tua dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 7, mengatur bahwa : orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (UU Sisdiknas, 2003 : 9).

Keputusan .Mendikbud 044/U/2002, menerangkan bahwa Komite sekolah mempunyai peran sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (sebagai pengontrol), sebagai mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah (Depdiknas 2004 : 23-24).

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dengan menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga

sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS (Manajemen Bebas Sekolah) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (Guru, Siswa, Kepala Sekolah, Karyawan, Orang Tua dan Masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Umaedi; 2001 : 3)

Prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam suasana nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip – prinsip yang disebut TQM (Total Quality Manajemen). Melalui mekanisme yang dikenal dengan konsepsi total football dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat.

Sekolah bertanggungjawab menentukan kebijakan, dalam melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut agar disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program – program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing – masing sekolah.

Program tersebut terdiri dari penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan sejak dari mingguan sampai dengan tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta

kurikulum yang telah ditetapkan baik pada tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sehingga setiap rencana dan program disusun serta dilaksanakan di sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan untuk pemerintahan Kabupaten Kota serta standar teknis yang diterapkan masing – masing satuan pendidikan. Manfaat spesifik dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah “ kompeten dalam mengambil keputusan, keterlibatan pengambilan keputusan, munculnya kreatifitas, mengarahkan sumber daya, rencana anggaran yang realistik dan meningkatkan motivasi guru” (Dharma; 2003 : 3)

Untuk menerapkan fungsi ini, komite sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah – sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah tersebut. Dengan demikian komite sekolah atas nama masyarakat dapat menyatakan setuju atau kurang setuju terhadap rencana yang telah disusun sekolah dengan syarat dapat memberi jalan keluar apabila kurang menyetujui program tersebut.

Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat, propinsi dan Kabupaten/ Kota, sekolah dapat juga menyusun program pendidikan *life skill* yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada masyarakat sekitar. Fungsi komite sekolah di sini dapat membantu sekolah – sekolah dalam mengumpulkan data mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya manusia yang tersedia di dalam masyarakat untuk diterjemahkan / disosialisasikan ke dalam program *life skill* yang mungkin dapat dilaksanakan di sekolah.

Mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui rapat komite sekolah yang diadakan pada awal tahun, tengah tahun (semester), dan pada akhir tahun diadakan evaluasi program. Hal tersebut mengandung maksud bahwa pada penyusunan program, setelah dilaksanakan pada pertengahan perjalanan kita amati dan apabila ada hal yang kurang sesuai, diperbaiki supaya sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Pada akhir tahun diadakan evaluasi dengan maksud untuk mengecek apakah program yang direncanakan berjalan dengan baik dan sebagai acuan program yang akan datang atau berikutnya.

Otonomi pendidikan, sekolah sebagai pelaksana pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun RAPBS pada setiap akhir tahun ajaran, yang digunakan pada tahun ajaran berikutnya. Sehingga semua yang sudah diprogramkan dalam RAPBS tersebut, perlu dituangkan ke dalam kegiatan – kegiatan. Dan anggaran yang tertera pada masing – masing pos yang telah diprogramkan sekolah agar dilaksanakan. Dari sisi pendapatan, semua jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh sekolah baik yang berasal dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten / kota serta dari swadaya masyarakat setiap tahunnya harus dituangkan dalam RAPBS.

Dengan kata lain setiap rupiah yang diperoleh dari sumber mana saja sepenuhnya diperhitungkan dan diketahui bersama – sama dengan semua pihak (Kepala Sekolah, Guru, TU dan siswa) maupun wakil stakeholder pendidikan yaitu Komite Sekolah.

Paradigma MBS (Managemen Berbasis Sekolah), sekolah diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan kondisi yang berlainan, dimungkinkan untuk dapat menggunakan sistem pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber – sumber daya pendidikan sendiri, asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat.

Oleh karena itu karakteristik setiap murid juga berbeda – beda secara individual, maka pendekatan pembelajaran juga dimungkinkan berbeda untuk masing – masing murid yang berlainan. Dalam keadaan seperti ini, maka komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing – masing sekolah. Komite sekolah juga dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner kepala sekolah dalam mengadakan sumber - sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan. Sehingga pelaksanaan pembelajaran akan lebih efektif.

Pada era otonomi pendidikan sekolah mempunyai tugas yang amat berat yaitu mempertanggungjawabkan kepada *stakeholder*/masyarakat sebagai pemakai pendidikan. Laporan pertanggungjawaban sekolah tidak hanya pada pemerintah Pusat atau Propinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi juga kepada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Komite Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat diperankan atau yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat melalui komite sekolah yaitu : membantu

pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang *kondusif* bagi belajar siswa dan membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun meningkatkan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan PBM (Proses Belajar Mengajar) dan mendukung pemecahan masalah pembiayaan / pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum sekolah mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah untuk melakukan kunjungan ke sekolah yang dinilai berhasil/maju/berkualitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melaksanakan program belajar di luar kelas/ sekolah.

Keberhasilan pendidikan yang ada pada sekolah merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi kebijakan serta kondisi atau situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Program persekolahan dari masa ke masa tidak lepas dari pengaruh kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan dalam era otonomi dan globalisasi, telah diupayakan pembaharuan dan pengembangan program sekolah yang mengacu pada kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing. Upaya tersebut dilaksanakan dengan meletakkan pendidikan sekolah pada satu sistem yang menuntut keterlibatan masyarakat sebagai perancang, pelaksana, penilai, sekaligus pemakai lulusan sekolah. Namun demikian upaya tersebut masih

menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut antara lain : Komite Sekolah secara kelembagaan usianya masih tergolong muda, terbentuk dengan adanya Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Secara rasional sistem kerja belum bisa maksimal, sebagai tangan panjang masyarakat/orang tua wali murid atau disebut *stakeholder* pendidikan, fungsi dan peran komite sekolah perlu dioptimalkan.

Sehingga komite sekolah bisa berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya atau yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah perlu dijalin dengan baik, dengan demikian fungsi dan peran kelembagaan dapat berperan dengan baik. Sehingga akan nampak kekuatan dan kelemahan yang dapat segera dapat diatasi dengan baik. Sekolah adalah salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk belajar menuntut ilmu , konsekwensi dari itu sekolah harus dapat menaruh kepercayaan pada masyarakat yang ditunjukkan dengan *out put* (lulusan) yang berkualitas. Dalam arti *out put* dari sekolah itu dapat diterima di Perguruan Tinggi yang Favorit dan dapat diterima di pasaran kerja.

Permasalahn lain adalah permasalahan otonomi daerah , dimana kewenangan pengaturan yang semula berada di pusat beralih ke daerah. Hal ini berimplikasi kepada daerah, akan lebih banyak berperan untuk memikirkan kepentingan masyarakatnya dan meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Paradigma pendidikan tentang persekolahan perlu diadakan reposisi, dari

paradigma pendidikan yang bersifat sentralistik, diarahkan ke paradigma yang mengarah kepada pemberdayaan potensi daerah (desentralisasi).

Paradigma pendidikan desentralistik mensyaratkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan sekolah melalui peningkatan manajemen pendidikan yang transparan. Dalam hal ini disamping menuntut peningkatan kemampuan manajemen Kepala Sekolah, juga perlunya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal dalam penyelenggaraan sekolah.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan sekolah melalui peningkatan manajemen pendidikan yang transparan, perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mewakili masyarakat. Keputusan Mendiknas RI No. 044/U/2002 dalam Lampiran I (Diknas Dirjen Dikdasmen 2004 : 43 dan 55) tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa “dukungan dan peran masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite sekolah yang mandiri.” Pengertian Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Adapun Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik di pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas tentang dukungan dan peran serta masyarakat dalam suatu wadah yang disebut Komite Sekolah maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Komite Sekolah dengan mengambil judul penelitian :

“Optimalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang “

B. *Focus Penelitian*

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan mengungkap secara menyeluruh semua aspek yang berhubungan dengan komite sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang, sehingga dapat dirumuskan focus penelitian sebagai berikut :

Bagaimana peranan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di SAM Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang ?

Adapun focus utama dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang ?
2. Bagaimanakah peran dan fungsi komite sekolah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang ?
3. Bagaimanakah kerjasama antara komite sekolah dengan warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, dan Staf serta siswa) di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Secara umum penelitian komite sekolah ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi komite sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang.

2. Khusus

- a. Mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang
- b. Mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang.
- c. Mengetahui bentuk kerjasama antara komite sekolah dengan warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, dan staf serta siswa) di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Proses dan hasil penelitian ini dapat merupakan pengembangan penelitian komite sekolah yang mempunyai peran dan fungsi meningkatkan

keikutsertaan masyarakat, khususnya peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri Mojogedang, yang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi pemegang kebijakan.